

INTEGRASI KADER NAHDLATUL ULAMA (NU) KE DALAM PARTAI PDI-PERJUANGAN DI PROVINSI RIAU

Oleh : Ahmad

Pembimbing : Adlin, S. Sos., M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The phenomenon of political integration between Nahdlatul Ulama (NU) cadres and Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) in Riau Province demonstrates an interesting shift in political orientation. NU, as a religious organization with a large mass base and moderate Islamic views, and PDI-P as a nationalist party that upholds the Pancasila ideology, created a new political dynamic when NU cadres chose to become active in PDI-P. This phenomenon raises questions about the factors driving this integration and how the process unfolded in the local context.

This study aims to understand the reasons and motivations of NU cadres to join the PDI-P and to analyze the extent to which shared values, strategic interests, and historical backgrounds influence their political choices. This study uses qualitative methods and a case study approach, where data were collected through in-depth interviews with seven informants who are NU cadres and active in the PDI-P, as well as documentation and participant observation to enrich the data.

Research results indicate that this integration was driven by shared values, nationalism, and moderation, the inclusive vision of the PDI-P leadership, and individual motivations such as organizational experience, personal beliefs, and political aspirations. This integration process was strategic and reciprocal, providing NU cadres with a channel for struggle in the formal political sphere while simultaneously strengthening PDI-P's religious base.

Keywords: *Political Integrationm Nahdlatul Ulama, PDI-Perjuangan, Political Motivation*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Organisasi keagaman terdiri dari beberapa agama yang diakui di Indonesia salah satunya yaitu Organisasi Masyarakat Islam. Organisasi Masyarakat Islam merupakan kelompok atau badan yang

dibentuk oleh umat Islam untuk memajukan nilai-nilai Islam dan mengabdi pada kepentingan masyarakat Indonesia. Dasar pendirian organisasi masyarakat Islam dapat berbeda-beda tergantung dari tujuan, visi dan misi masing-masing organisasi. Akan tetapi, secara umum

organisasi kemasyarakatan Islam berdiri atas dasar keinginan untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan umat Islam serta untuk memperkokoh nilai-nilai Islam dan menambah pengetahuan tentang Islam (Machmudi 2013). Pada dasarnya, landasan berdirinya Organisasi Masyarakat Islam adalah keinginan untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan umat Islam, memperkuat nilai-nilai Islam, dan memperluas pengetahuan tentang Islam untuk kemaslahatan umat manusia yang ada di Indonesia.

Ada banyak Organisasi Masyarakat Islam yang sangat familiar dikalangan masyarakat Indonesia (Fajar 2023). Berikut adalah beberapa diantaranya:

Nama-Nama Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia

| No | Nama | Tahun Berdiri |
|----|------------------------|-------------------|
| 1 | Nahdlatul Ulama (NU) | 31 Januari 1926 |
| 2 | Muhammadiyah | 18 November 1912 |
| 3 | Al Irsyad Al Islamiyah | 6 September 1914 |
| 4 | Al Washliyah | 30 November 1930 |
| 5 | Wahdah Islamiyah | 18 Juni 1988 |
| 6 | Hidayatullah | 5 Februari 1973 |
| 7 | Alkhairat | 11 Juni 1930 |
| 8 | Mathla'ul Anwar | 10 Juli 1916 |
| 9 | Persatuan Islam | 12 September 1923 |

| | | |
|----|------------------|--------------|
| 10 | Nahdlatul Wathan | 1 Maret 1953 |
|----|------------------|--------------|

Sumber : Kementerian Agama RI tahun 2023

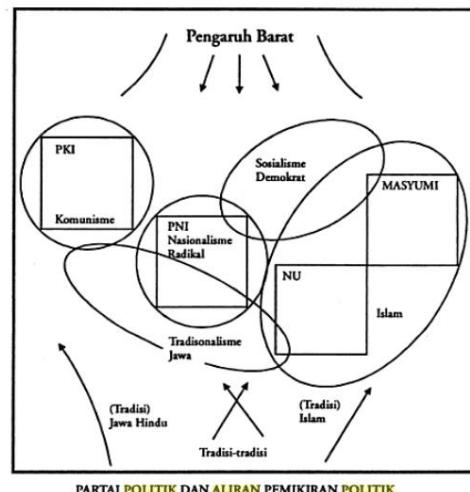
Perlu diketahui bahwa, Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan membawa dampak positif bagi umat Islam dan masyarakat luas. Selain itu, Organisasi Masyarakat Islam juga turut memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia dengan mengutamakan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kepentingan umat Islam secara kolektif (Machmudi 2013). Dengan mengatur tatanan sosial untuk umat beragama Islam tentu membutuhkan peran dari Organisasi Masyarakat Islam dalam membantu memudahkan kehidupan bersosial maupun beragama di negara Indonesia.

Berintegrasinya kader Organisasi Masyarakat Islam ke dalam partai politik tentu saja memberikan kesempatan Organisasi Masyarakat Islam untuk dapat secara langsung memproses pengambilan keputusan politik yaitu dalam mengatur regulasi dan pernyataan sikap berpolitik. Melalui partai politik, para kader Organisasi Masyarakat Islam dapat lebih mudah terlibat dalam perumusan kebijakan publik yang berhubungan dengan isu-isu yang relevan dengan umat Islam dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kader-kader yang berintegrasi dapat memperjuangkan kepentingan dan aspirasi umat Islam serta rakyat Indonesia secara lebih efektif, memastikan bahwa kebijakan

yang dibuat memperhatikan dan memajukan nilai-nilai syariat Islam serta kesejahteraan umat Islam dan rakyat Indonesia.

Menurut Herbert Feith dan Lance Castle di dalam buku “*Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987*” (Mulkhan 1989) yang melakukan studi terkait perkembangan dari aliran pemikiran politik atau partai politik di Indonesia, mengidentifikasi bagaimana perkembangan aliran pemikiran politik dan partai politik dengan pendekatan komprehensif yang mengabdopsi pengaruh norma-norma politik dari luar Indonesia, termasuk Barat. Mereka kemudian menggolongkan ke dalam lima garis besar aliran pemikiran dan partai politik. Nasionalis radikal/*radical nationalism* (PNI), tradisional Jawa/Javanese traditionalism, komunis/*communism* (Partai Komunis Indonesia/PKI), Islam (Masyumi dan PNU), dan sosialisme demokrat/demokratic socialism (Partai Sosialis Indonesia/PSI). dari kelima aliran itu dipengaruhi oleh norma-norma yang diadopsi dari Barat dan ada juga berasal asli dari Indonesia (seperti budaya Hindu-Jawa dan Islam).

Peta Partai Politik dan Aliran Pemikiran Politik



Sumber: *Jurnal Pemikiran Politik Muhammad Natsir Tentang Hubungan Islam dan Negara*.

Gambar di atas menjelaskan peta aliran pemikiran yang berbeda dan terkait dengan beberapa partai politik besar. Selain itu, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, Herbert Feith dan Lance Castles mencoba mempetakan aliran pemikiran politik Islam menjadi dua partai besar: Masyumi dan Nahdhatul 'Ulama (NU). Namun, meskipun kedua partai tersebut memiliki dasar yang sama, kedua partai tersebut juga dipengaruhi oleh dua aliran yang tidak termasuk dalam Islam tradisi. Masyumi, sebagai kelompok reformis, lebih banyak dipengaruhi oleh aliran Sosialisme Demokrat. Sementara itu dibandingkan antara partai Masyumi dengan Nahdlatul Ulama maka Nahdhatul Ulama lebih banyak dipengaruhi oleh aliran politik Tradisionalisme Jawa (Iskandar and Ip 2015).

Menurut pendapat Geertz, orang-orang yang cenderung masuk ke dalam kebudayaan santri berorientasi pada partai Islam seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), atau Partai Nahdlatul Ulama (PNU). Mereka yang lebih abangan cenderung memilih partai non-agama yang kental dengan nuansa kejawen dan berbudaya tinggi, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) (Noor 2014).

Bersinerginya masyarakat Islam tradisi dengan partai politik Islam disebabkan sejalananya ideologi masyarakat Islam tradisi dengan partai politik Islam. Sebagai masyarakat Islam tradisi dan partai politik Islam yang sama-sama menganut ideologi Agama Islam tentu saja dapat dengan mudah dalam menafsirkan semua fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia, maka dengan sejalananya ideologi memberikan kemudahan kepada partai politik Islam untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena keresahan yang dialami masyarakat Islam tentu saja sifatnya menyeluruh ke segala aspek permasalahan di lingkungan sosial, apapun fenomena yang meresahkan masyarakat beragama Islam tentu sama-sama memberikan keresahan disetiap lapisan masyarakat Indonesia.

Selain itu, alasan yang mengutamakan masyarakat Islam tradisi cenderung memilih partai politik Islam dikarenakan masyarakat Islam tradisi lebih percaya kepada partai politik Islam yang dapat mewakili dan memperjuangkan kepentingan umat Islam dengan

membuat peraturan dan kebijakan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Umat Islam yakin dan percaya terhadap partai politik Islam yang mampu mewujudkan dan merepresentasikan aspirasi serta kepentingannya secara efektif. Hal ini menjadi dorongan kuat bagi umat Islam dalam mengambil keputusan untuk memilih partai politik di Indonesia, karena mereka percaya bahwa partai politik Islam dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Dari gagasan teori yang dikemukakan oleh Herbert Feith dan Lance Castles mengalami bertabrakan antara realita lapangan dengan teori yang dikemukakan oleh Herbert Feith dan Lance Castles , secara teori kelompok Islam tradisi yaitu kader Nahdlatul Ulama akan berintegrasi ke dalam partai politik Islam, akan tetapi peneliti menemukan nama-nama kader Nahdlatul Ulama Islam yang berintegrasi ke dalam partai politik nasionalisme yaitu Partai PDI-Perjuangan. Permasalahan ini peneliti menemukan wilayahnya yang diterdapat di Provinsi Riau.

Fenomena keterlibatan kader Nahdlatul Ulama dalam ranah politik bukanlah hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Akan tetapi, hal yang menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam ialah fenomena terjadinya integrasi kader Nahdlatul Ulama ke dalam Partai PDI-Perjuangan, khususnya di wilayah Provinsi Riau. Pada tahun 2023 ditemukannya sejumlah kader Nahdlatul Ulama secara aktif

mengambil peran structural di Partai PDI-Perjuangan, bahanan ada yang menduduki posisi strategis dalam kepengurusan partai di tingkat provinsi. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika dan interaksi antara dua kekuatan besar, Nahdlatul Ulama sebagai basis agama dan Partai PDI-Perjuangan sebagai basis nasionalisme. Hal ini menjadi pembahasan menarik karena Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi Islam moderat, sedangkan PDI-Perjuangan mengutarakan ideologi nasionalisme yang menekankan pada nilai-nilai kebangsaan dan kerakyatan.

Nama-Nama Kader Organisasi Masyarakat Islam Berintegrasi Ke Dalam Partai PDI-Perjuangan Provinsi Riau

| No | Nama | Organisasi Masyarakat Islam | Jabatan di Partai |
|-----|----------------------------------|--|--|
| 1. | Andi Darma Taufiq | Anggota Muhammadiyah | Anggota DPRD Provinsi Riau |
| 2. | Dr. Nurhamin | Anggota Muhammadiyah | Caleg DPR RI Dapil 2 |
| 3. | M. Hafidz | Pemuda Muhammadiyah | Kader Partai |
| 4. | H. Suryadi Khusaini, S.Sos.MM | Muktsar Nahdatul Ulama | Ketua DPD Provinsi Riau Tahun 2000-2010 |
| 5. | H. T. Rusli Ahmad, SE | Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Riau | WK. Ketua DPD Provinsi Riau Tahun 2005-2019 |
| 6. | H. Zukri Misran | Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Pelalawan | Ketua DPD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 |
| 7. | Drs. Turoechan As'ari | WK. Ketua Bidang Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama | WK. Ketua DPD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 |
| 8. | Ma'mun Solikhin, MA | WK. Ketua Bidang Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama | Bendahara DPD Provinsi Riau Tahun 2015-2024 |
| 9. | Sugeng Pranoto, S.Sos | WK. Ketua Bidang Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama | WK. Ketua Bidang Keagamaan DPD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 |
| 10. | Asnaldi, S.Ag | Anggota Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama | Staff Fraksi DPD Provinsi Riau |
| 11. | Purwaji | Ketua Banser Riau | Kader Partai |
| 12. | H. Rudinal Batubara, S.E., M. H. | Kader Nahdlatul Ulama Provinsi Riau | Wakil Sekretaris Bidang Program |

Sumber : DPD PDI-Perjuangan Provinsi Riau dan Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dibuktikan bahwa tidak relevannya teori Herbert Feith dan Lance Castle di zaman sekarang, tentu saja hal disebabkan oleh sebuah motivasi politik yang menjadikan kader Nahdlatul Ulama

berintegrasi ke dalam partai politik PDI-Perjuangan Provinsi Riau. secara teori, menurut David Easton political motivation berasal dari interaksi antara individu dan sistem politik yang lebih bagus dan lebih luas, secara pandangan individual melihat kepada sistem politik dan apakah memberikan mereka kepuasan serta memenuhi kebutuhan politik mereka yang hasilnya akan berpengaruh kepada motivasi politik individu (Wuttke 2020). Dari teori David Easton, political motivation muncul tiga dimensi utama, yaitu :

1. Persepsi Individu terhadap Sistem Politik : Bagaimana seseorang melihat sistem politik dan institusi politik di sekitar mereka memengaruhi motivasi politik mereka. Bagaimana seseorang melihat pemerintahan, partai politik, dan institusi lainnya akan berdampak pada sikap dan partisipasi politik mereka.
2. Kepuasan Kebutuhan Politik : Easton menekankan bahwa motivasi politik berasal dari kebutuhan individu untuk menikmati partisipasi politik. Jika seseorang merasa partisipasi politik memenuhi kebutuhan atau harapan mereka seperti keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan pengakuan, mereka akan ter dorong untuk terlibat dalam politik.
3. Dampak Interaksi : Easton menekankan bahwa dalam membentuk motivasi politik, interaksi antara individu dan sistem politik sangat penting.

Melalui partisipasi politik mereka, individu dapat mempengaruhi sistem politik, dan sebaliknya, sistem politik juga dapat mempengaruhi motivasi dan partisipasi politik individu.

Melalui adanya Organisasi Masyarakat Islam yang memiliki peranan untuk kestabilan sosial dan politik di Indonesia tentu saja setiap Organisasi Masyarakat Islam akan mempersiapkan kader-kader yang akan berintegrasi ke dalam partai politik di Indonesia dengan tujuan untuk mengimplementasikan tujuan, visi, dan misi dari Organisasi Masyarakat Islam. Dengan berintegrasi ke dalam partai politik, tentu Organisasi Masyarakat Islam memiliki kecenderungan untuk memilih partai politik mana yang akan menjadi wadah dalam memperjuangkan tujuan, visi, dan misi Organisasi Masyarakat Islam, Kecenderungan ini ialah dalam mengambil keputusan untuk memilih partai politik yaitu partai politik berbasis Islam seperti PAN, Partai UMMAT, PKS, PKB, PBB, dan PPP. Namun, terdapat sebuah realita yang bertabrakan dengan teori yang dikemukakan oleh Herbert Feith dan Lance Castles yaitu masyarakat Islam tradisi akan cenderung memilih partai politik Islam yang disebabkan partai politik Islam akan lebih mudah mewakili kepentingan masyarakat Islam atau lebih memperhatikan keberadaan dan keinginan dari umat Islam itu sendiri, akan tetapi terdapat sebuah permasalahan yaitu kader biasa dan kader struktural Nahdlatul Ulama yang terdata berintegrasi ke dalam

partai nasionalis yaitu PDI-Perjuangan di Provinsi Riau.

Latar belakang penelitian ini berfokus pada fenomena banyaknya kader Nahdlatul Ulama yang memilih bergabung dengan Partai PDI-Perjuangan khususnya di Provinsi Riau. Fenomena ini menunjukkan dinamika yang menarik dalam interaksi antara ormas Islam dan partai politik nasionalis yang sebelumnya dianggap berada dalam ranah politik yang terpisah. Ditengah pergeseran orientasi politik kader kader ormas keagamaan, integrasi kader Nahdlatul Ulama ke dalam Partai PDI-Perjuangan memunculkan pertantanyaan tentang faktor pendorong dan dampaknya, baik secara internal Nahdlatul Ulama maupun terhadap kebijakan Partai PDI-Perjuangan.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada relasi politik, tetapi juga pada nilai-nilai dan motivasi ideologis, historis, dan strategis yang menyatukan kedua entitas besar ini. Hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena dapat memberikan wawasan tentang model integrasi politik yang terjadi di tingkat lokal sebagai bagian dari praktik demokrasi Indonesia.

Dari penelitian ini, peneliti menemukan permasalahan dimana terjadi bersebrangannya antara teori Herbert Feith dan Lance Castles dengan realitas politik di tingkat Provinsi Riau, teridentifikasinya kader biasa dan kader Struktural Organisasi Masyarakat Islam yang berintegrasasi ke dalam Partai Politik PDI-Perjuangan Provinsi Riau. Oleh karena itu, peneliti

tertarik untuk meneliti **Integrasi Kader Nahdlatul Ulama Ke Dalam Partai PDI-Perjuangan di Provinsi Riau**. Penelitian tersebut didasarkan pada adanya kader biasa dan kader struktural Nahdlatul Ulama yang berintegrasi ke dalam Partai PDI-Perjuangan yang diketahui sebagai partai politik nasionalis.

RUMUSAN MASALAH

Apa faktor yang menyebabkan Kader Nahdlatul Ulama berintegrasi ke dalam Partai PDI-Perjuangan di Provinsi Riau?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini ialah agar dapat mendeskripsikan dan menjelaskan apa saja faktor yang menyebabkan Kader Nahdlatul Ulama berintegrasi ke dalam Partai PDI-Perjuangan

Manfaat Penelitian

A. Secara teoritis

1. Penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan di bidang ilmu politik khususnya mengenai integrasi kader Organisasi Masyarakat Islam ke dalam partai politik.
2. Melatih kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
3. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Agar penelitian ini mampu menjawab keingintahuan peneliti tentang integrasi kader organisasi masyarakat Islam (ORMAS) ke dalam partai PDI-Perjuangan di Provinsi Riau

B. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang integrasi kader Nahdlatul Ulama ke dalam partai PDI-Perjuangan di Provinsi Riau serta untuk melengkapi salah satu persyaratan perkuliahan dalam mencapai gelar strata satu. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sama.

KAJIAN TEORI

A. Studi Terdahulu

Penelitian tedahulu menjadi salah satu acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

Pertama, penelitian Afif Umikalsum dan Fauzan. Integrasi Sosial Dalam Membangun Keharmonisan Masyarakat. Jurnal JAWI. Vol. 2 No. 1. Tahun 2019. Meneliti tentang bagaimana integrasi sosial dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan bertetangga di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Kehidupan di Kabupaten Pesawaran terkadang seringkali didapati perpecahan dalam keharmonisan dalam bermasyarakat yang diakibatkan karena meningkatnya politik identitas suku bangsa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan

masyarakat. Dalam penelitian ini mendapatkan fenomena faktor yang mempengaruhi terbentuknya integarsi sosial yaitu sikap toleran masyarakat dan kesetaraan pendidikan dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat walaupun berbeda dalam politik identitas yang dimiliki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi sosial ini dapat terbentuk secara alami melalui nilai-nilai kearifan yang dimiliki masyarakat melalui kearifan lokal masyarakat adat Lampung.

Kedua, penelitian Marahalim, Katimin, dan Elly Warnisyah Harahap. Khittah Nahdlatul Ulama: (Pemahaman Makna, Integrasi Politik dan Jati Diri NU). Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama. Vol. 4 No. 3 Tahun 2023. Nahdlatul Ulama merupakan salah satu Organisasi Masyarakat Islam terbesar yang ada di Indonesia, dalam perbincangan hangat di publik Nahdlatul Ulama adalah salah satu Organisasi Masyarakat Islam yang menyumbang suara terbesar di setiap Pemilihan Umum yang dilaksanakan 5 tahun sekali, peran yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama dianggap memainkan politik praktis di Indonesia. Nahdlatul Ulama memiliki khittah yang merupakan pendirian sebagai pedoman dalam menjalankan sistem organisasi, khittah ini bertujuan agar organisasi Nahdlatul Ulama dapat bergerak atas dasar keadilan dan kemashlahatan umat Islam. Ideologi yang dimiliki oleh

Nahdlatul Ulama ialah Agama Islam yang menjadi dasar dari pergerakan disegi sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik. kontribusi Nahdlatul Ulama dalam catatan sejarah menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama akan cenderung memihak kepada partai-partai Islam seperti Partai Masyumi, Partai NU, dan Partai PKB. Catatan sejarah ini menjadi landasan bukti bahwa Nahdlatul Ulama memiliki jejak kontribusi dalam berpolitik di Indonesia.

Ketiga, penelitian Firdaus Muhammad, Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama. Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Vol. 9 No. 1. Juni 2015. Penelitian ini membahas tentang kiprah yang dilalui oleh kader Nahdlatul Ulama selama keterlibatannya dalam membangun dan memajukan negara, dalam sejarahnya peran Nahdlatul Ulama sebagai bentuk reaksi untuk membangun pergerakan keseimbangan politik Indonesia. Pemabangunan tradisi politik yang dilakukan oleh NU melalui sentral figur kepada kiyai yang mana sentral ini dilakukan untuk mengumpulkan basis suara melalui peranan santri pesantren dan juga masyarakat beragama yang Islam, kader-kader NU cenderung mendominasi partai PKB dan beberapa partai yang berkerjasama dengan NU. Seiring dalam perkembangan waktu, peran pemuda NU yang akan menjadi regenerasi kepengurusan melakukan sebuah pergerakan

perubahan yang mana mereka membentuk sistem moderinasi yaitu post liberalis sebagai bentuk wajah baru dari NU. Perkembangan zaman memberikan perubahan yang meninggalkan beberapa kebiasaan dan tradisi politik yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, tradisi tersebut ialah berintegrasinya kader NU ke dalam partai politik Islam yang ada di Indonesia.

Keempat, penelitian Alexander Wuttke, *Political Motivation : Why some citizens engage with politics and others do not*. University of Mannheim. 16 November 2020. Penelitian ini meneliti terkait mengapa dan bagaimana keterlibatan masyarakat kepada politik dan juga mengapa masyarakat yang lain tidak ingin terlibat dengan politik, dalam penelitian ini melibatkan aspek ilmu pengetahuan berupa ilmu psikologi dan juga ilmu sosial yang meneliti dan menyimpulkan keterlibatan masyarakat secara individu dalam dunia politik. Terdapat faktor-faktor yang memotivasi masyarakat untuk tumbuh dalam mengambil sikap dan menentukan keputusan dalam mengambil pendirian untuk terlibat atau tidak terlibat dalam politik.

Kelima, penelitian Mohammad Ali Mas'udi, dkk, Analisis Nomadisme Politik Dalam Pemilukada 2020 (Studi Perpindahan Elit Politik (Sanusi) dari PKB ke PDI-Perjuangan Di Kabupaten Malang). Jurnal Respon Publik. Vol. 15. No. 9. Tahun 2021. Meneliti tentang perilaku politik

yang dilakukan oleh elit politik yaitu Sanusi sebagai kandidat yang akan berkompetisi di Pemilukada 2020. Elit politik (Sanusi) melakukan perpindahan partai, berasal sebagai kader Partai PKB dan berpindah menjadi kader Partai PDI-Perjuangan. Hasil dari penelitian menunjukkan motif yang melatarbelakangi Sanusi berpindah partai ada dua hal yaitu partai politik sebagai kendaran politik dan motif ini sebagai dasar hak politik individu. Kemudian, sebagai proses untuk melatih dan mempersiapkan diri agar menjadi orang yang disiplin serta layak memegah amanah yang diberikan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa studi sebelumnya. Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan fenomena integrasi kader Nahdlatul Ulama yang bergabung ke dalam Partai PDI-Perjuangan di Provinsi Riau. Faktor-faktor yang menjadikan kader Nahdlatul Ulama menjadikan titik fokus dalam pembahasan penelitian ini dan lokasi penelitian menjadi gambaran kondisi politik yang terjadi pada provinsi yang menjadi tempat penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, menurut Moloeng (Moleong 2017) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena alami yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan, dll., secara deskriptif atau verbal (kata-kata dan

bahasa), di dalam lingkungan yang terjadi secara alami dan dengan menggunakan metode yang dapat disentuh secara alami. Metode kualitatif terdiri dari kegiatan penting yang tidak menggunakan kuantifikasi (statistik), menciptakan perspektif penelitian secara menyeluruh melalui pengamatan mendalam, dan memberikan pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan subjek penelitian. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mempermudah peneliti dalam menemukan informasi dan fenomena-fenomena yang ingin diteliti yaitu Integrasi Kader Nahdlatul Ulama Ke Dalam Partai PDI-Perjuangan di Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu fenomena yang menarik dapat ditemukan pada perbedaan dua aliran politik utama, yakni santri dan abangan yang memainkan peran penting dalam sejarah terbentuknya Negara Indonesia. Kedua aliran tersebut menawarkan cara pandang yang berbeda terhadap gagasan berbangsa dan bernegara. Aliran politik dalam membangun bangsa, dengan menekankan semangat nasionalisme yang inklusif dan sekuler. Sementara itu, aliran politik santri berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam sebagai pedoman dalam membangun bangsa, dengan berpegangan teguh dan yakin bahwa nilai-nilai Islam harus menjadi fondasi dalam pembentukan sistem dan lembaga kenegaraan (Hafel, 2019). Perbedaan padangan ini tidak hanya

mencerminkan keragaman pemikiran politik yang ada di Indonesia, tetapi juga memperlihatkan dinamika interaksi antara agama dan nasionalisme dalam proses pembentukan identitas kebangsaan.

Dari pengertian tersebut, menggambarkan bagaimana peran dari masing-masing golongan aliran politik dalam melakukan perannya sebagai aliran politik yang berpengaruh dalam tatanan politik di Indonesia. Aliran politik santri misalnya, cenderung lebih mengedepankan gagasan pembangunan kenegaraan yang berlandaskan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh Agama Islam, sedangkan aliran abangan atau nasionalisme yang lebih mengedepankan jiwa kenegaraan dalam membangun negara. Dalam hal ini, muncul sebuah fenomena menarik yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, yakni fenomena berupa bergabungnya sejumlah kader Nahdlatul Ulama (NU) ke dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan). Fenomena ini menarik untuk dikaji karena Nahdlatul Ulama dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki cara pandang yang berbeda dalam merumuskan strategi pembangunan nasional dan memiliki budaya politik yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mendorong kader Nahdlatul Ulama memilih Partai PDI-Perjuangan sebagai Partai Politik mereka ketimbang memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang secara historis memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Organisasi Nahdlatul Ulama.

Studi tentang integrasi politik memegang peranan penting dalam memahami bagaimana proses integrasi dari individu atau kelompok ke dalam sistem politik berlangsung. Studi ini menekankan pada faktor yang memungkinkan individu merasa terhubung, berpartisipasi, dan berkontribusi pada dinamika politik suatu masyarakat. Integrasi politik tidak hanya mencakup partisipasi aktif seperti pemilihan umum atau keterlibatan dalam organisasi politik, tetapi juga mencakup penerimaan terhadap nilai-nilai, norma-norma, dan lembaga-lembaga yang mendukung sistem politik tersebut. Melalui studi ini, dapat dianalisis bagaimana aspek-aspek seperti identitas kolektif, pendidikan politik, dan representasi yang adil dalam pengambilan keputusan berperan dalam memperkuat kohesi politik. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk menciptakan kondisi politik yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemetaan aliran politik di Indonesia pada tahun 1965 yang dilakukan oleh Herbert Feith dan Lance Castle menjadi salah satu kajian penting dalam memahami dinamika social dan politik pada saat itu. Herbert Feith dan Lance Castle mengelompokkan masyarakat Indonesia ke dalam tiga kelompok utama yaitu Priyayi, Abangan, dan Santri yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dalam pandangannya tentang negara dan politik. Priyayi cenderung mewakili kaum birokrat tradisional, Abangan menggabarkan masyarakat pedesaan

yang sinkretis, sedangkan Santri cenderung merupakan kelompok masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai anajaran Agama Islam. Ketiga kelompok ini turut memberikan kontribusi terhadap arah pembangunan nasional dengan perspektif yang seringkali berbeda bahkan saling bertentangan.

Namun, relevansi teori yang dikemukakan oleh Herbert Feith dan Lance Castle dalam konteks politik Indonesia pada masa sekarang perlu ditinjau kembali. Perubahan sosial yang cepat, globalisasi, digitalisasi, dan meningkatnya kesadaran akan identitas politik telah menciptakan pola-pola baru dalam dinamika politik Indonesia. Fragmentasi sosial yang sebelumnya berbasis pada tradisional nilai-nilai local kini bergeser ke arah isu-isu seperti ekonomi, ekologi, gender, dan kebijakan global. Kelompok-kelompok seperti yang dijabarkan oleh Herbert Feith dan Lance Castle tidak lagi sepenuhnya mencerminkan realitas masyarakat Indonesia saat ini, di mana identitas politik semakin kompleks dan cair. Generasi muda yang digerakkan oleh teknologi digital juga cenderung memberikan dampak membangun identitas politik berdasarkan isu-isu tertentu dari pada sekadar warisan budaya.

Dalam konteks ini, pengkajian ulang terhadap teori-teori klasik seperti yang dikemukakan oleh Herbert Feith dan Lance Castle tidak hanya relevan tetapi juga penting. Ini tidak berarti bahwa teori-teori mereka harus ditinggalkan sama sekali, tetapi lebih kepada pengembangan pendekatan-

pendekatan baru yang lebih sesuai dengan realitas sosial-politik modern. Dengan demikian, pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika politik Negara Indonesia kontemporer dapat dicapai, sekaligus menjadi panduan yang lebih relevan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan politik di masa mendatang.

Terdapat tokoh-tokoh besar dalam Organisasi Nahdlatul Ulama di Provinsi Riau yang bergabung ke dalam Partai Nahdlatul Ulama. Tokoh-tokoh tersebut, yaitu:

Dalam halaman berita media *online* Rusli Ahmad selaku Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Riau, mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya para pemilih pada Pemilu Damai 2024 agar menjadi pemilih cerdas dengan tidak termakan informasi hoax dan juga tidak turut ikut menyabarkan informasi hoax atau konten negatif di media sosial. Rusli Ahmad juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia agar memilih dengan hati nurani dan melihat seluruh program-progam yang sudah dipaparkan oleh seluruh paslon yang ikut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

H. T. Rusli Ahmad, SE selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi dalam kegiatan Nahdlatul Ulama Provinsi Riau



Sumber: Halaman Berita Media Online Jangkarnews.com

Halaman berita media online ini tidak ada terindikasi bahwa Rusli Ahmad membawa identitasnya sebagai kader Partai PDI-Perjuangan, Rusli Ahmad lebih memperlihatkan dirinya sebagai kader Nahdlatul Ulama. Pernyataan yang disampaikan dalam berita tersebut lebih memposisikan dirinya sebagai ketua salah satu Organisasi Masyarakat Islam yang mana lebih membawa masyarakat untuk tetap melaksanakan Pemilu yang damai tanpa ada perseteruan diantara sesama masyarakat Indonesia (Redaksi 2024).

H. Zukri Misran selaku Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Riau dan H. T. Rusli Ahmad, SE selaku Wakil Ketua DPD PDI-Perjuangan dalam kegiatan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pelalawan



Sumber: Halaman Berita Media Online riaumandiri.co

Tepat pada tanggal 20 Desember 2018 Zukri Misran terpilih sebagai ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pelalawan. Pada foto tersebut terlihat bahwa Zukri Misran selaku Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Riau terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pelalawan yang didampingi langsung oleh Rusli Ahmad selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPD PDI-Perjuangan Provinsi Riau.

Pada proses pemilihan ini Zukri terpilih secara aklamasi dalam konfrensi cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pelalawan tahun 2018, proses pemilihan ini berjalan lancar dan kondusif tanpa ada kontra serta konflik yang terjadi selama berjalannya konferensi ini. Menurut Rusli Ahmad terhadap Zukri Misran yang terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten

Pelalawan berpendapat bahwa Zukri merupakan sosok yang sangat bertaggung jawab dengan organisasinya dan bagus dalam bermasyarakat, Zukri juga merupakan sosok pemimpin yang dapat mampu memimpin Nahdlatul Ulama kedepannya (Riau Mandiri, 2018)

**Purwaji selaku Kader PDI-
Perjuangan dalam kegiatan
peresmian Rumah Toleransi PW GP
Ansor Riau**



Sumber: Halaman Berita Media
Online Nusaperdana.com

Purwaji selaku kader Partai PDI-Perjuangan Provinsi Riau dalam acara peresmian Rumah Toleransi Pengurus Wilayah GP Ansor Nahdlatul Ulama Riau yang mana dihadiri langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia H. Yaqud Cholil Qoumas, dalam kegiatan ini Purwaji merupakan sosok Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Nahdlatul Ulama Provinsi Riau. GP

Ansor merupakan Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama yang bertugas sebagai membina generasi muda Islam yang berpegang kepada nilai-nilai *Ahlusunnah Wal Jamaah*, sekaligus menguatkan semangat kebangsaan dan nasionalisme (Megah, 2022).

Dalam acara peresmian Rumah Toleransi Pengurus Wilayah GP Ansor Nahdlatul Ulama Riau, Purwaji menyatakan bahwa Rumah Toleransi ini sebagai permujudan atau cerminan simbolis untuk persatuan dan keberagaman umat beragama yang ada di Provinsi Riau, hal ini tentunya menjadikan Purwaji sebagai sosok perwakilan pemuda Nahdlatul Ulama yang dapat dicontoh oleh pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Riau (Redaksi 2022).

Dari foto-foto kegiatan Nahdlatul Ulama diatas menunjukkan bukti bahwa terdapat tokoh-tokoh besar Nahdlatul Ulama ada yang bergabung ke dalam Partai PDI-Perjuangan, tentunya hal ini merupakan hal yang menarik untuk dicari apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kader Nahdlatul Ulama bergabung ke dalam Partai PDI-Perjuangan dan tidak bergabung ke dalam Partai PKB. Jika dilihat dari sejarah Indonesia, Partai PKB merupakan partai yang lahir langsung dari rahim Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Juli 1998 pasca-Reformasi di Indonesia (Mubin 2020).

Terdapat beberapa kader Nahdlatul Ulama yang bergabung ke dalam Partai PDI-Perjuangan ini didorong oleh sejumlah faktor, terutama adanya kesamaan nilai dan norma yang relevan secara kultural dan sosial. Kader Nahdlatul Ulama

melihat peluang strategis untuk memperjuangkan kepentingannya melalui partai besar seperti PDI-Perjuangan. Pengaruh tokoh dan kesamaan visi politik menjadi faktor penting yang memperkuat keputusan tersebut, sementara kesadaran secara historis tentang hubungan partai dalam perjuangan nasional juga memberikan legitimasi emosional dan ideologis. Dengan latar belakang tersebut, integrasi ini mencerminkan dinamika politik lokal yang berbasis pragmatis dan afiliasi berbasis nilai.

Integrasi Politik

Integrasi berasal dari kata latin integratio yang berarti “penyatuan” atau “keseluruhan”. Secara umum, integrasi merupakan proses penggabungan berbagai macam elemen menjadi satu kesatuan yang harmonis dan fungsional. Istilah ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti sosial, politik, ekonomi, atau budaya (Marahalim, Katimin 2023). Makna integrasi akan selalu terkait dengan penyatuan berbagai macam elemen. Dalam konteks berpolitik, integrasi politik berfungsi untuk membangun rasa persatuan di antara golongan-golongan politik yang bersifat heterogen, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama, seperti pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Integrasi politik juga didasari oleh motivasi politik yang dimiliki oleh kader Nahdlatul Ulama untuk bergabung ke dalam partai PDI-Perjuangan.

Integrasi politik memiliki poin-poin penting yang saling berhubungan

dengan proses yang memiliki nilai-nilai dapat berhubungan dengan segala bentuk dan aspek yang ada dalam integrasi kader Nahdlatul Ulama ke dalam Partai PDI-Perjuangan yang ada di Provinsi Riau. Menurut Jean Monnet integrasi politik merupakan suatu proses keterlibatan dua golongan yang disatukan dalam kepentingan politik untuk mencapai tujuan yang selaras dengan keinginan bersama dengan cara berkoalisi dalam berpolitik (Marahalim, Katimin 2023). Menurut Jean Monnet, integrasi politik terjadi dikarenakan ada sebuah kesamaan rasa dalam berpolitik yang mengakibatkan negara atau entitas politik melakukan kerja sama untuk menciptakan struktur politik bersama. Pemicu terjadinya integrasi politik, yaitu:

1. Keuntungan Bersama

Keuntungan bersama merujuk pada manfaat kolektif yang diperoleh dari bagi berbagai kelompok atau aktor politik ketika mereka bergabung atau bekerja sama dalam suatu sistem politik yang lebih luas. Pada dasarnya politik merupakan memperoleh suatu kekuasaan, memperluas suatu kekuasaan, dan mempertahankan suatu kekuasaan (Budiardjo 2003). Maka dari itu, konsep ini berakar pada gagasan bahwa integrasi politik tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi menciptakan kondisi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam lingkup organisasi masyarakat Islam dan Partai PDI-Perjuangan di Provinsi Riau.

Kelompok aliran politik Islam (Nahdlatul Ulama) dan kelompok aliran politik Nasionalisme Radikal

(PDI-Perjuangan) merupakan dua aliran politik besar yang saling bersebrangan dalam pandangan politik, perbedaan ini didasari dari perbedaan ideologi politik yang diterapkan pada masing-masing kelompok aliran politik. Kekuatan politik yang besar dimiliki oleh masing-masing kelompok aliran politik ini membangun peta politik yang signifikan di Indonesia, melalui dinamika-dinamika yang dialami oleh masing-masing kelompok aliran politik memberikan kesadaran bahwa apabila kedua kelompok politik disatukan maka akan menjadi kekuatan politik yang sangat besar dan bersifat mendominasi di sistem politik Indoensia.

Integrasi kader Nahdlatul Ulama ke dalam Partai PDI-Perjuangan di Provinsi Riau, hal ini didukung karena kedua kelompok menyadari bahwa kerja sama akan membawa sebuah kebermanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan konflik atau persaingan politik antar kedua kelompok aliran politik.

2. Visi pemimpin

Visi pemimpin merupakan integrasi politik yang mengacu pada pandangan, tujuan, dan strategi yang dimiliki oleh sesosok pemimpin dalam menyatukan berbagai kelompok sosial atau kelompok politik ke dalam sistem yang lebih berlekatan dan saling berikatan. Visi pemimpin adalah faktor kunci dalam menentukan arah politik, mambangun solidaritas, dan menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap integrasi kolompok-kelompok dengan ideologi,

kepentingan, dan latar belakang sosial yang berbeda.

Dalam konteks integrasi kader Nahdlatul Ulama ke dalam Partai PDI-Perjuangan di Provinsi Riau, visi pemimpin memegang peran penting dalam mendorong keterlibatan kader Nahdlatul Ulama untuk bergabung ke dalam Partai PDI-Perjuangan, hal ini merupakan salah satu dorongan yang memberikan pengaruh signifikan dalam menentukan arah politik dari kader, berawal dari kecintaan dan keselarasan antara visi pemimpin dan kader menjadikan dorongan yang terjadi tanpa ada paksaan tertentu.

3. Kesamaan Nilai dan Norma

Kesamaan nilai dan norma merupakan bagian dalam integrasi politik, hal ini mengacu pada proses penting yang menunjang terbentuknya kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Integrasi ini tidak hanya dipahami sebagai penuatan wilayah atau kelompok semata, tetapi sebagai pembentukan kesadaran kolektif yang dilandasi oleh kesamaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat dan anggota masyarakat itu sendiri. Nilai dan norma yang dimaksud dapat berupa prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, serta penghargaan terhadap hukum dan institusi politik yang sah.

Dalam konteks integrasi kader Nahdlatul Ulama ke dalam Partai PDI-Perjuangan di Provinsi Riau, kader-kader Nahdlatul Ulama yang bergabung ke dalam Partai PDI-Perjuangan memiliki rasionalitas yang bersifat relevan dengan kondisi serta motivasi yang dimiliki oleh beberapa

informan. Dalam hal ini, para informan menjelaskan bahwa semangat juang nasionalisme adalah prinsip yang sama dengan yang dimiliki oleh partai politik dan organisasi masyarakat tersebut. Kecintaan terhadap negara adalah semangat juang dan prinsip perjuangan yang dipegang oleh para informan yang telah diwawancara.

4. Kesadaran Historis

Kesadaran historis merupakan alasan yang rasional yang dilakukan individu dalam melakukan integrasi politik, kesadaran politik ini merujuk pada proses penyatuan dan kohesi sosial-politik yang tumbuh dari pemahaman dan penghargaan secara kolektif terhadap sejarah yang terjadi bersama-sama antara suatu kelompok sosial atau komunitas politik. Kesadaran historis yang dilakukan oleh individu tidak hanya sekedar melihat sejarah sebagai elemen yang membentuk identitas, solidaritas, dan arah perjuangan politik bersama.

Dalam konteks integrasi kader Nahdlatul Ulama ke dalam Partai PDI-Perjuangan di Provinsi Riau, kesadaran historis memainkan peran penting dalam membangun rasa memiliki terhadap negara dan sistem politik. Melalui pemahaman atas peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah. Tumbuhnya kesadaran historis pada informan wawancara menjadi motivasi krusial yang dimiliki oleh para informan, ikatan historis ini berfungsi sebagai perekat sosial yang menyatukan satu individu yang berbeda secara organisasi baik ideologi dan prinsip pada organisasi yang diikuti.

Teori Motivasi Politik

Fenomena perilaku yang dilakukan oleh kader Nahdlatul Ulama disebabkan oleh motivasi politik berdasarkan faktor internal dan eksternal, menurut Alexander Wuttke proses terjadinya motivasi politik yang terbentuk dalam individu, yaitu:

1. Kepentingan pribadi

Motivasi politik yang muncul dari kepentingan pribadi ini menjadi landasan umum yang didasari oleh individu-individu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan. Secara teori, keterlibatan politik yang berdasarkan pada kepentingan pribadi tidak sepenuhnya negatif. Akan tetapi, jika kepentingan pribadi tidak selaras atau sejalan dengan nilai dan tujuan kolektif, maka akan memicu sebuah permasalahan yang serius pada integrasi politik.

Kepentingan pribadi menurut Jamse S. Coleman (Pyrkina and Yudanov 2023), menjelaskan bahwa individu dalam suatu sistem politik bertindak sebagai agen yang rasional dalam membuat keputusan berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) dari tindakan yang dilakukan oleh individu. Dengan kata lain, partisipasi politik serung kali dimotivasi oleh potensi keuntungan pribadi, bukan hanya karena ideologi atau nilai-nilai nasional. Dalam situasi ini, ketika individu merasa bahwa kepentingan mereka tidak ditanggapi oleh sistem, maka mereka mungkin akan menarik diri atau bahkan menentang sistem tersebut.

2. Kesadaran diri terhadap politik

Salah satu faktor penting yang mendorong partisipasi dalam kehidupan politik dan memperkokoh pada proses integrasi politik terkait kesadaran diri. Maka dari itu, kesadaran diri mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk memahami jati diri, status sosial, hak, tanggung jawab, dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran diri merupakan landasan moral dan psikologis bagi partisipasi politik yang sehat, karena kesadaran diri muncul sebuah dorongan untuk berpartisipasi dalam membentuk tatanan politik yang adil, inklusif, dan bekelanjutan.

Kesadaran diri menurut Paulo Fereire (Weiss 2024), kesadaran diri merupakan tahap awal kesadaran kritis yang mendorong seseorang untuk melakukan hal yang bersikap tidak aktif atau bersikap pasif dalam menghadapi realita sosial politik, tetapi secara aktif mengambil peran untuk mengubahnya dalam kerangka integrasi politik. Individu yang memiliki kesadaran diri yang tinggi tidak hanya akan memahami bagimana hak politiknya, akan tetapi juga menyadari bahwa integrasi politik merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif yang harus dijaga.

Kesadaran diri terhadap politik mendorong individu untuk berpartisipasi secara rasional dan etis, serta menjalin rasa solidaritas dengan sesama warga negara berdasarkan nilai-nilai yang dianut bersama. Hal ini tentunya berperan aktif dan penting dalam menciptakan integrasi politik yang horizontal, yaitu keterhubungan

antar individu adanya dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain. Individu yang memiliki kesadaran diri tidak hanya menuntut hak, tetapi juga mengutamakan dialog, toleransi, dan kontribusi aktif untuk menjaga stabilitas dan integrasi sosial politik.

3. Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi merupakan salah satu faktor penting yang membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku politik individu. Pengalaman pribadi ini dapat berupa keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial politik, pengalaman diskriminasi, ketidakadilan, konflik sosial, atau bahkan keberhasilan dalam memperjuangkan hak-hak tertentu. Pengalaman pribadi tersebut menjadi titik tolak terbentuknya orientasi dan latarbelakang politik yang kemudian memengaruhi sejauh mana seseorang merasa terintegrasi atau terpinggirkan dari sistem politik yang ada.

Pengalaman pribadi menurut Charles Tilly (Habibi 2017), pengalaman kolektif yang berulang dapat membangun dan menciptakan solidaritas sosial serta politik yang menjadi dasar integrasi. Misalnya, kelompok orang yang pernah mengalami penindasan atau pengucilan cenderung memiliki pengalaman sejarah bersama yang memotivasi mereka untuk membangun dan membentuk gerakan politik secara kolektif demi pengakuan dan integrasi yang lebih adil.

Pengalaman pribadi tidak hanya membentuk dan membangun motivasi politik individu, akan tetapi juga berperan dalam membentuk narasi kolektif dan gerakan kesadaran tentang siapa yang merasa menjadi bagian dari

negara dan siapa yang merasa terpinggirkan. Kesadaran akan pengalaman pribadi ini menentukan arah dan kualitas integrasi politik dalam masyarakat.

4. Nilai dan keyakinan

Nilai dan keyakinan merupakan landasan normatif yang memengaruhi bagaimana individu dan kelompok memahami realitas sosial, menentukan perilaku politik, dan memilih bentuk partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang dianggap penting dan dijunjung tinggi, seperti keadilan, kebebasan, solidaritas, dan kesetaraan. Sementara itu, keyakinan mencakup sistem kepercayaan yang lebih dalam, bersifat ideologis, religious, atau filosofis, dan menjadi kerangka berpikir dalam menilai tindakan yang akan dilakukan, keputusan politik, dan kebijakan politik.

Nilai dan keyakinan menurut Milton Rokeach (Hafel 2011), nilai dan keyakinan merupakan komponen inti yang memotivasi pergerakan tindakan manusia, termasuk tindakan politik. Individu yang meyakini pentingnya keadilan sosial, misalnya, akan cenderung ter dorong untuk dapat terlibat dalam gerakan politik yang memperjuangkan redistribusi kesejahteraan atau melawan ketimpangan. Maka dari itu, nilai bukan hanya menjadi pendorong internal, tetapi juga alat pengikat sosial yang memperkuat integrasi politik.

Integrasi politik yang stabil dan inklusif hanya mungkin terjadi jika ada nilai-nilai dasar bersama yang disepakati secara bersama-sama oleh

warga negara. Nilai-nilai seperti persatuan, toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan ketebukaan terhadap perbedaan menjadi hal yang mempererat sosial dan menyatukan berbagai latar belakang budaya, suku, agama, dan ideologi menjadi sebuah satu kesatuan politik yang utuh dan baku. Sebaliknya, keyakinan yang eksklusif dan dogmatis berpotensi menimbulkan persaingan sosial jika tidak dipadukan dengan semangat dialog dan kemauan untuk hidup berdampingan dalam kerangka berbangsa dan bernegara.

5. Aspirasi dan harapan

Aspirasi dan harapan merupakan salah satu sumber utama dalam motivasi politik, hal ini yang akan mendorong seorang individu dan kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam sistem politik. Aspirasi mengacu pada keinginan atau cita-cita individu untuk menentukan masa depan yang lebih baik, baik secara pribadi maupun kolektif. Oleh karena itu, harapan yang terkait dengan keyakinan bahwa perubahan politik dan sosial yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera dapat dicapai melalui proses yang demokratis dan partisipatif.

Aspirasi dan harapan menurut David Easton (Habibi 2017), sistem politik pada dasarnya berfungsi untuk mengelola masukan atau saran dari masyarakat berupa tuntutan-tuntutan dan dukungan langsung yang bertujuan untuk kemajuan dan peradaban, kemudian merubahnya menjadi peraturan dan kebijakan yang berwenang. Aspirasi dan harapan masyarakat tercakup dalam bentuk saran dan masukan. Ketika sistem

politik mampu menanggapi aspirasi dengan baik, maka kepercayaan public akan meningkat dan integrasi politik akan dapat terjadi secara kuat dan kokoh. Sebaliknya, kegagalan sistem dalam menanggapi atau merespon aspirasi justru dapat berujung pada kekecewaan, apatisme, dan bahkan disintegrasi.

Aspirasi politik sering kali muncul dari berbagai pengalaman dalam ketidakadilan, marginilisasi, atau kurangnya akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Maka dari itu, partisipasi politik menjadi sarana untuk memperjuangkan perubahan. Misalnya, kelompok minoritas atau masyarakat akar rumput sering terlibat langsung dalam gerakan politik sebagai bentuk mengemukakan ekspresi harapan akan pengakuan, representasi atau mewakilkan, dan peningkatan kualitas hidup. Harapan ini menjadi energy kolektif yang menggerakkan solidaritas dan memperkuat integrasi melalui tujuan bersama.

6. Identitas dan afinitas kelompok

Identitas merupakan hal yang memegang peranan penting dalam membentuk orientasi politik antar individu dan antar kelompok. Identitas politik tidak hanya merujuk kepada afiliasi partai ataupun ideologi, akan tetapi juga mencakup ke dimensi sosial seperti suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan orientasi kelas sosial. Pada saat yang sama, afinitas kelompok merupakan rasa kedekatan emosional dan solidaritas dengan kelompok-kelompok tertentu yang mana akan menjadikan kekuatan yang dapat mendorong individu untuk terlibat

aktif dalam kompetisi politik. Motivasi politik yang didasarkan pada identitas dan afinitas kelompok yang kuat dikarenakan hal ini berakar pada rasa memiliki dan keterkaitan terhadap komunitas tertentu.

Identitas dan afinitas menurut Benedict Anderson (Umikalsum 2019), bangsa dan identitas kolektif terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang ada di masyarakat dan dibentuk oleh sejarah, budaya, dan narasi atau gagasan bersama. Maka dari itu, keterlibatan politik sering kali didasarkan pada kesetiaan kepada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai bagian dari identitas individu, seperti kelompok etnis, organisasi sosial, dan komunitas agama.

Afinitas kelompok menjadi hal penting dalam landasan berpikir ketika individu merasa bahwa kelompoknya terpinggirkan, didiskriminasi, atau merasa tidak menerima representasi yang bersifat adil dalam sistem politik. Situasi ini mendorong motivasi politik yang kuat untuk memperjuangkan pengakuan, keadilan, dan posisi tawar menawar yang setara dalam struktur kekuasaan. Maka dari itu, identitas dan afinitas bukan hanya faktor yang mendorong partisipasi semata namun juga sebagai alat untuk memperjuangkan politik secara kolektif.

Pada negara Indonesia, keterlibatan politik berdasarkan identitas kelompok dapat dilihat dari peran signifikan organisasi masyarakat yang berbasis agama atau etnis, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kelompok adat, dan sayap partai politik. Ikatan emosional yang kuat

dan kokoh antara anggota komunitas ini merupakan kekuatan pendorong yang penting dalam konsolidasi politik dan proses integrasi di sosial dan politik, hal ini tentunya ketika dapat dikembangkan dalam kerangka nasional yang sifatnya inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kader Nahdlatul Ulama (NU) ke dalam partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Provinsi Riau merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara nilai, sejarah, dan motivasi individu. Kesamaan visi kebangsaan antara NU yang mengusung nilai ke-Islam-an moderat dan PDIP yang menujunjung nilai nasionalisisme Pancasila menjadi dasar kuat yang memudahkan proses integrasi.

Integrasi ini juga tidak terlepas dari sejarah hubungan yang panjang antara NU dan kekuatan-kekuatan nasionalis sejak awal kemerdekaan Indonesia. Faktor keterbukaan PDIP terhadap keberagaman, serta peran strategis partai di tingkat lokal, menjadi daya tarik bagi kader NU untuk ikut serta dalam struktur partai. Wawancara mendalam dengan para informan menunjukkan bahwa motivasi politik yang mendorong kader NU bergabung ke PDIP antara lain adalah pengalaman organisasi, nilai-nilai agama yang inklusif, dan harapan untuk turut serta dalam proses pengambilan kebijakan.

Dengan demikian, integrasi ini tidak hanya memperluas pengaruh NU dalam arena politik, tetapi juga memperkuat posisi PDIP di tingkat

lokal melalui legitimasi sosial-keagamaan yang dimiliki kader-kader NU. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian hubungan antara organisasi keagamaan dan partai politik nasionalis dalam konteks politik lokal di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan pengalaman dalam penulisan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa fenomena integrasi politik kader-kader Nahdlatul Ulama ke dalam Partai PDI-Perjuangan di Provinsi Riau bukanlah fenomena yang sederhana atau dapat dipahami hanya dari satu perspektif saja. Proses-proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telah dokumen membuka pemahaman baru bagi peneliti bahwa latarbelakang politik, budaya, sejarah, dan dinamika kekuasaan lokal memiliki pengaruh besar dalam membangun pola integrasi yang terjadi di daerah tersebut.

Peneliti mengamati bahwa faktor personal, seperti pengalaman pribadi, nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki, dan aspirasi politik, memegang peranan sangat penting dalam mempengaruhi keputusan mereka untuk bergabung dengan partai politik tertentu. Pengalaman ini memperkuat keyakinan peneliti bahwa kajian integrasi politik tidak dapat dipisahkan dari konteks lokal yang melingkupinya, sehingga perlu dibangun pemahaman yang lebih luas melalui pendekatan komparatif yang mencakup daerah lain.

Berdasarkan pengalaman tersebut, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya tidak hanya berfokus pada

satu daerah tertentu saja, tetapi juga melakukan studi komparatif di daerah lainnya. Hal ini sangat penting karena menilai pola perilaku dalam integrasi politik terbukti bervariasi, bergantung pada kekuatan politik lokal, konfigurasi budaya lokal, dan sejarah hubungan Nahdlatul Ulama dengan partai politik di setiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi an Kualitatif*. Bandung: PT. Renaja Rosdakarya Offset.
- Mulkhan, A. M. (1989). *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987*. Jakarta: Rajawali.
- Sudijono, S. (1995). *Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wuttke, A. (2020). *Political Motivation Why some citizens engage with politics and others do not*. Baden-Württemberg, German: University of Mannheim.
- Subakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik* (Keempat). Jakarta: Grasindo.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI -Press).
- Weiss, Julia. 2024. "Disengaged or Raising Voices? An Analysis of the Relationship between Individual Risk Perception and Non-Institutionalised Political Participation." *Acta Politica* 59(2): 439–57. doi:10.1057/s41269-023-00301-x.
- Pyrkina, Olga, and Andrey Yudanov. 2023. "Free-Rider Problem: Simulating of System Convergence to Stable Equilibrium State by Means of Finite Markov Chain Models." In *Communications in Computer and Information Science*, Springer, 78–93. doi:10.1007/978-3-031-33728-4_6.
- Ramanair, Joseph. 2020. "Media Consumption and Civic Engagement: The Reasoned Action Theory as a Way Forward to Determine the Relationship." *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 36(1): 224–47. doi:10.17576/JKMJC-2020-3601-13.
- Jurnal :**
- Creswell, J. W. (2014). Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. *Sage Publication*, 15–30. <https://doi.org/10.4324/9780203803448-9>
- Iskandar, I., & Ip, S. (2015). Pemikiran Politik Muhammad Natsir Tentang Hubungan Islam dan Negara. *Transnasional*, 6(2), 1755–1770. <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/2714>
- Machmudi, Y. (2013). Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia. *Pusat Kajian Timur Tengah Dan Islam Universitas Indonesia (PTKTTI UI) Kampus*

- Baru UI Depok Jawa Barat 16424, 466.
- Mohammad Ali Mas'udi, Slamet Muchsin, K. (2021). ANALISIS NOMADISME POLITIK DALAM PEMILUKADA 2020 (Studi Perpindahan Elit Politik (Sanusi) Dari PKB Ke PDI-Perjuangan Di Kabupaten Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Malang , 65144. *Jurnal Respin Publik*, 15(9), 31–35.
- Muhammad, F. (2015). Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama. *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 9(1), 57–76.
- Nilwani. (2016). Kiprah Muhammadiyah dalam Kancah Politik Nasional. *Tarbawi Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 33–43.
- Noor, F. (2014). Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi. *Masyarakat Indonesia*, 40(1), 57–74.
- Cholis, M. N. (2016). Manajemen Kaderisasi dalam Mencetak Kader Organisasi Militan. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 7(2), 1–23. http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-1-7-no-2-2021/03_J_ISOSS_7_2.pdf
- Umikalsum, A. (2019). Integrasi Sosial Dalam Membangun Keharmonisan Masyarakat. *Integrasi Sosial Dalam Membangun Keharmonisan Masyarakat JAWI*, 2(1), 65–86. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawiDOI:http://dx.doi.org/10.24042/jw.v2i1.2841>
- Marahalim, Katimin, dan E. W. H. (2023). KHITTAH NAHDLATUL ULAMA : (Pemahaman Makna , Integrasи Politik Dan Jati Diri NU). *Jurnal Kademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama*, 4(3), 57–84.
- Megah, S. I., Wilany, E., & Dewi, D. S. (2022). Pelatihan Speaking Bahasa Inggris Dengan Menggunakan Platform Zoom Meeting Pada Staff Biro Keuangan Bp Batam. *Puan Indonesia*, 3(2), 131–138. <https://doi.org/10.37296/jpi.v3i2.72>
- Peraturan Perundang Undangan :**
Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN*. 44(8), 1689–1699. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. *Quality Progress*, 35(13), 1–11.
- Website :**
Fajar, R. (2023). *Ini 10 Ormas Islam Terpopuler di Indonesia*.

- Https://Nyantri.Republika.Co.Id/.
<https://nyantri.republika.co.id/posts/197792/ini-10-ormas-islam-terpopuler-di-indonesia>
- Mandiri, R. (2018). *Terpilih Secara Aklamasi, Zukri Pimpin PCNU Pelalawan.* Riaumandiri.Com
<https://www.riaumandiri.co/read/detail/66250/terpilih-sekara-aklamasi-zukri-pimpin-pcnu-pelalawan>
- Redaksi. (2024). *Ketum DPP Santanu Rusli Ahmad,Ajak Seluruh Elemen Ciptakan Pemilu Damai.* Jangkarnews.Com.
<https://jangkarnews.com/detail/2257/ketum-dpp-santanu-rusli-ahmadajak-seluruh-elemen-ciptakan-pemilu-damai>
- Redaksi. (2022). *Menag RI Resmikan Rumah Toleransi PW GP Ansor Riau.* Nusaperdana.Com.
<https://nusaperdana.com/menag-ri-resmikan-rumah-toleransi-pw-gp-ansor-riau>